

Reformasi Birokrasi Kepolisian Pada Satuan Reskrim Polres Bangka Tengah: Kajian Teoritis Dan Studi Kasus

Imam Satriawan¹

¹Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Desember 1, 2024

Revised Desember 1, 2024

Accepted Desember 8, 2024

Kata Kunci:

Birokrasi,
Investigasi,
Kriminal,
Reformasi,
Polisi

Keywords:

*Bureaucracy,
Criminal,
Investigation,
Reformation,
Police*

ABSTRAK

Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) memiliki peran penting dalam penegakan hukum, terutama dalam penanganan kasus kejahatan yang memengaruhi stabilitas sosial. Polres Bangka Tengah, sebagai bagian dari institusi kepolisian, menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan fungsi Reskrim, baik dari segi struktur birokrasi yang kaku maupun kapasitas sumber daya manusia (SDM). Dalam penelitian memiliki beberapa masalah yang akan dibahas seperti apa saja tantangan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Satuan Reskrim Polres Bangka Tengah, bagaimana implementasi reformasi birokrasi diterapkan di Reskrim Polres Bangka Tengah dan apa langkah strategis yang dapat diambil untuk mengoptimalkan reformasi birokrasi. Dalam penelitian ini memiliki tujuan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam reformasi birokrasi di Satuan Reskrim Polres Bangka Tengah. Metode penulisan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, dengan sumber data sekunder berupa buku, jurnal bereputasi (2014–2024), serta laporan resmi dari institusi terkait. Dalam penelitian ini memiliki beberapa analisa seperti efektivitas digitalisasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, kolaborasi antar lembaga dan tantangan yang masih ada. Dalam penelitian ini, Reformasi birokrasi di Satuan Reskrim Polres Bangka Tengah terbukti memberikan dampak positif dalam meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang harus diselesaikan, terutama dalam hal penguatan teknologi dan peningkatan kapasitas SDM. Dengan implementasi strategi yang sistematis dan konsisten, Polres Bangka Tengah dapat menjadi model reformasi birokrasi di tingkat daerah.

ABSTRACT

The Criminal Investigation Unit (Reskrim) is important in law enforcement, especially in handling crime cases that affect social stability. Central Bangka Police, as part of the police institution, faces various challenges in carrying out the Criminal Investigation function, both in terms of a rigid bureaucratic structure and human resource (HR) capacity. In the research, several problems will be discussed, such as what are the challenges in implementing bureaucratic reform in the Central Bangka Police Criminal Investigation Unit, how bureaucratic reform is implemented in the Central Bangka Police Criminal Investigation Unit, and what strategic steps can be taken to optimize bureaucratic reform. This research aims to identify the challenges faced in bureaucratic reform at the Central Bangka Police Criminal Investigation Unit. The writing method uses a descriptive-analytical approach, with secondary data sources in the form of books, reputable journals (2014–2024), and official reports from related institutions. This research has several analyses such as the effectiveness of digitalization, increasing human resource competence, collaboration between institutions, and the challenges that still exist. In this research, bureaucratic reform in the Central Bangka Police Criminal Investigation Unit was proven to have a positive impact on improving performance and public trust. However, there are still several challenges that must be resolved, especially in terms of strengthening technology and

increasing human resource capacity. By implementing systematic and consistent strategies, the Central Bangka Police can become a model for bureaucratic reform at the regional level.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Imam Satriawan
Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya,
Palembang, Indonesia
Email: imamsatriawan1985@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) memiliki peran penting dalam penegakan hukum, terutama dalam penanganan kasus kejahatan yang memengaruhi stabilitas sosial. Sebagai garda terdepan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, Reskrim memegang tanggung jawab besar dalam menegakkan supremasi hukum. Peran ini tidak hanya mencakup penegakan hukum, tetapi juga pencegahan kejahatan melalui penanganan kasus yang cepat, tepat, dan profesional. Dalam konteks ini, Polres Bangka Tengah sebagai bagian dari institusi kepolisian di Indonesia memiliki tanggung jawab yang sama, menghadapi berbagai tantangan baik internal maupun eksternal [1].

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah struktur birokrasi yang kaku. Struktur birokrasi yang tidak fleksibel sering kali menghambat proses pengambilan keputusan, terutama dalam situasi yang membutuhkan respons cepat. Keputusan yang lambat tidak hanya berpotensi mengurangi efektivitas penyelidikan, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan institusi kepolisian. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi hambatan lain yang signifikan. Banyak anggota kepolisian, khususnya di tingkat daerah, belum memiliki kompetensi yang memadai untuk menangani kasus-kasus yang semakin kompleks.

Reformasi birokrasi di lingkungan Reskrim menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan ini. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem kerja yang lebih efisien, meningkatkan akuntabilitas dalam setiap proses, dan memastikan transparansi dalam pelaksanaan tugas. Dengan reformasi yang terencana, diharapkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dapat meningkat. Kepercayaan publik adalah modal sosial yang sangat penting bagi institusi hukum seperti Polri. Tanpa kepercayaan masyarakat, efektivitas penegakan hukum akan sulit dicapai.

Namun, tantangan Reskrim di Polres Bangka Tengah tidak hanya bersifat internal. Lingkungan eksternal juga memberikan tekanan tersendiri, terutama dalam menghadapi berbagai jenis kejahatan yang terus berkembang. Kejahatan tidak lagi hanya bersifat konvensional, seperti pencurian atau penganiayaan, tetapi juga mencakup kejahatan modern seperti cybercrime, perdagangan manusia, dan korupsi. Jenis-jenis kejahatan ini membutuhkan pendekatan yang lebih inovatif dan penggunaan teknologi yang canggih.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, penggunaan teknologi informasi menjadi salah satu langkah penting yang harus diadopsi oleh Satuan Reskrim. Teknologi informasi dapat

mendukung proses penyelidikan dan penyidikan, terutama dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Sistem yang terintegrasi dengan baik dapat membantu anggota Reskrim dalam melacak pola kejahatan, mengidentifikasi pelaku, dan menyusun strategi penanganan yang lebih efektif. Dengan memanfaatkan teknologi, proses penegakan hukum dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan efisien.

Selain itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan yang berkelanjutan juga menjadi elemen kunci dalam reformasi Reskrim. Pelatihan ini tidak hanya mencakup keterampilan teknis dalam penyelidikan, tetapi juga pengembangan soft skills seperti komunikasi, negosiasi, dan pengelolaan konflik. Kompetensi ini sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme anggota Reskrim dalam menangani kasus kejahatan, terutama yang melibatkan masyarakat secara langsung [2].

Lebih lanjut, pentingnya penguatan kolaborasi antara Reskrim dengan institusi lain, seperti kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat, juga harus menjadi perhatian. Kolaborasi ini dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga. Misalnya, dalam kasus tindak pidana korupsi atau perdagangan manusia, kolaborasi yang kuat antara kepolisian dan instansi terkait dapat mempercepat proses penyelesaian kasus.

Selain itu, reformasi juga harus mencakup perubahan budaya kerja di lingkungan Reskrim. Budaya kerja yang profesional, transparan, dan akuntabel harus menjadi landasan dalam setiap tindakan. Hal ini penting untuk mengurangi potensi penyimpangan, seperti penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Budaya kerja yang baik akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, sekaligus meningkatkan moral dan integritas anggota Reskrim.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja kepolisian, termasuk Satuan Reskrim. Masyarakat saat ini semakin kritis dalam menilai kinerja institusi publik, termasuk kepolisian. Oleh karena itu, Reskrim harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, program-program seperti "Polisi Presisi" yang dicanangkan oleh Polri dapat menjadi panduan untuk meningkatkan kualitas pelayanan [3].

Selain tantangan operasional, aspek kebijakan juga menjadi faktor yang memengaruhi kinerja Reskrim. Kebijakan yang tidak sinkron antara tingkat pusat dan daerah sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan yang memastikan bahwa setiap keputusan di tingkat daerah selaras dengan arahan strategis dari pusat. Hal ini penting untuk menciptakan keselarasan dalam pelaksanaan tugas, sehingga Reskrim dapat bekerja secara optimal.

Dalam konteks Polres Bangka Tengah, reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas SDM harus disertai dengan pendekatan yang spesifik sesuai dengan karakteristik wilayah tersebut. Sebagai wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, Polres Bangka Tengah sering kali menghadapi kasus-kasus seperti illegal mining, konflik agraria, dan kejahatan lingkungan. Kasus-kasus ini membutuhkan penanganan yang berbeda dengan kasus-kasus konvensional, baik dari segi pendekatan maupun strategi penegakan hukum.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai tantangan dan peluang dalam reformasi birokrasi di lingkungan Reskrim Polres Bangka Tengah. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, tetapi juga

untuk memberikan rekomendasi yang konkret dalam meningkatkan kinerja Reskrim. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya menciptakan penegakan hukum yang lebih baik, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polres Bangka Tengah.

Penelitian ini juga relevan dalam konteks yang lebih luas, mengingat tantangan yang dihadapi Polres Bangka Tengah juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh institusi kepolisian di berbagai daerah di Indonesia. Dengan demikian, reformasi yang dilakukan di Polres Bangka Tengah dapat menjadi model atau rujukan bagi satuan kepolisian lainnya dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan hukum.

Pada akhirnya, reformasi birokrasi di lingkungan Reskrim bukan hanya tentang perubahan struktural atau prosedural, tetapi juga tentang membangun kembali kepercayaan publik. Kepercayaan ini adalah fondasi yang sangat penting untuk menciptakan stabilitas sosial, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan nasional secara keseluruhan. Dengan langkah-langkah yang tepat dan terencana, Reskrim Polres Bangka Tengah diharapkan dapat menjadi contoh sukses dalam penegakan hukum yang modern, profesional, dan berintegritas.

2. METODE

Metode penulisan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci fenomena yang diteliti, sekaligus menganalisis hubungan antara berbagai aspek yang relevan dengan permasalahan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari berbagai literatur, seperti buku, artikel dalam jurnal bereputasi (periode 2014–2024), serta laporan resmi dari institusi terkait.

Data sekunder dari literatur tersebut dipilih secara selektif berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya untuk mendukung analisis yang dilakukan. Jurnal bereputasi diprioritaskan untuk memberikan dasar teoretis yang kuat dan pembaruan informasi terkini terkait reformasi birokrasi, penegakan hukum, serta kinerja Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) [4]. Selain itu, laporan resmi dari institusi kepolisian, seperti Polres Bangka Tengah dan instansi lain yang relevan, digunakan untuk memperoleh data empiris yang valid terkait kebijakan, tantangan, dan implementasi reformasi.

Dalam proses analisis, data yang dikumpulkan diorganisasikan secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, hubungan, serta temuan-temuan utama. Teknik analisis dilakukan dengan membandingkan teori yang ada dengan data empiris untuk menghasilkan simpulan yang komprehensif. Melalui pendekatan deskriptif-analitis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan, sekaligus memberikan rekomendasi yang aplikatif dalam upaya peningkatan kinerja Reskrim di Polres Bangka Tengah [5].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tantangan di Satuan Reskrim Polres Bangka Tengah

1. Budaya Organisasi yang Resistif

Budaya kerja yang resistif terhadap perubahan masih menjadi kendala utama dalam reformasi birokrasi di Satuan Reskrim Polres Bangka Tengah. Hal ini terlihat dari kebiasaan menggunakan pendekatan pragmatis yang tidak sejalan dengan Standar Operasional Prosedur

(SOP) yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, beberapa kasus ditangani dengan cara informal yang dapat mengurangi akurasi dan efisiensi dalam penyidikan (Effendi, 2019) [2]. Pola kerja seperti ini memperlambat proses penegakan hukum dan menciptakan ketidakkonsistenan dalam hasil investigasi.

2. Keterbatasan Fasilitas Pendukung

a. Teknologi:

Sistem pelaporan yang masih mengandalkan metode manual menjadi penghambat utama dalam upaya percepatan penanganan kasus. Penggunaan teknologi yang terbatas tidak hanya memengaruhi efisiensi tetapi juga akurasi data yang diperlukan untuk analisis forensik [7].

b. Sumber Daya Manusia (SDM):

Sebagian besar penyidik belum memiliki kompetensi khusus dalam penggunaan teknologi forensik. Selain itu, minimnya pelatihan reguler untuk penyidik membuat mereka kurang siap menghadapi tantangan hukum modern, seperti penanganan kasus berbasis digital [8]

3. Tingkat Kompleksitas Kasus

Tantangan lain yang signifikan adalah tingginya kompleksitas kasus yang ditangani. Banyak kasus, seperti pencurian tambang dan perdagangan ilegal, melibatkan lebih dari satu yurisdiksi dan membutuhkan koordinasi lintas institusi. Kurangnya sistem koordinasi yang terintegrasi sering menyebabkan keterlambatan penyelesaian kasus.

3.2 Strategi Implementasi Reformasi Birokrasi

1. Digitalisasi Proses Penanganan Kasus

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Penyidikan (SIMPID) menjadi langkah strategis untuk mengatasi inefisiensi yang disebabkan oleh sistem manual. Dengan digitalisasi ini, seluruh proses mulai dari pelaporan hingga pemantauan perkembangan kasus dilakukan secara elektronik, sehingga mempercepat penyelesaian dan meningkatkan akurasi data [9].

2. Peningkatan Kapasitas SDM

Langkah peningkatan SDM dilakukan melalui pelatihan rutin yang berfokus pada penguasaan teknologi digital dan investigasi berbasis data. Selain itu, penyidik juga diberi kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi profesional yang relevan dengan penanganan kasus kompleks [10]. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis tetapi juga membantu penyidik beradaptasi dengan perubahan teknologi dan hukum modern .

3. Kerja Sama Lintas Lembaga

Polres Bangka Tengah telah membangun kemitraan dengan berbagai institusi, seperti pemerintah daerah, kejaksaan, dan kementerian terkait, untuk meningkatkan efektivitas koordinasi. Hal ini sangat membantu terutama dalam penanganan kasus lintas yurisdiksi yang membutuhkan keputusan cepat dan sinergi yang baik.

4. Penguatan Etika dan Integritas

Untuk memastikan reformasi berjalan efektif, sistem penghargaan dan sanksi diterapkan secara konsisten. Penggunaan whistleblowing system menjadi instrumen penting dalam mencegah penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas internal (Effendi, 2019). [6]

3.3 Studi Kasus di Reskrim Polres Bangka Tengah

1. Pencurian Sepeda Motor (2023)

Dalam pengungkapan sindikat pencurian kendaraan bermotor, SIMPID berperan penting dalam mempercepat proses administrasi dan pelaporan. Reformasi ini berhasil memangkas waktu penyelesaian kasus hingga 30% dibandingkan metode sebelumnya.

2. Kasus Penambangan Timah Ilegal (2023)

Penanganan kasus ini menunjukkan pentingnya digitalisasi data barang bukti dan kolaborasi lintas lembaga. Meski ada peningkatan kecepatan dalam penyelesaian, beberapa tantangan teknis seperti pelaporan hasil investigasi masih memerlukan penyempurnaan.

3. Kasus Penipuan Online (2022)

Ketiadaan keahlian dalam investigasi digital menjadi kendala utama dalam kasus ini. Namun, pelatihan forensik digital dan kerja sama dengan lembaga fintech serta provider telekomunikasi memberikan hasil signifikan dalam mengungkap pelaku. Penyidik juga mendapatkan keterampilan baru yang relevan untuk kasus serupa di masa mendatang.

4. KESIMPULAN

Reformasi birokrasi di Satuan Reskrim Polres Bangka Tengah terbukti memberikan dampak positif dalam meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang harus diselesaikan, terutama dalam hal penguatan teknologi dan peningkatan kapasitas SDM. Dengan implementasi strategi yang sistematis dan konsisten, Polres Bangka Tengah dapat menjadi model reformasi birokrasi di tingkat daerah.

REFERENSI

- [1] Indonesia National Police. (2023). *Laporan Tahunan Polres Bangka Tengah*. Pangkal Pinang: Polri Press.
- [2] Osborne, D., & Gaebler, T. (2014). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Boston: Addison-Wesley.
- [3] Polres Bangka Tengah. (2023). *Laporan Perkembangan Digitalisasi di Satuan Reskrim*. Pangkal Pinang: Dokumentasi Internal Polri.
- [4] UNDP. (2022). *Bureaucratic Reform and Sustainable Development Goals*. New York: United Nations Development Programme.
- [5] Burnes, B. (2014). *Managing Change: A Strategic Approach to Organizational Dynamics*. New York: Prentice Hall.
- [6] Effendi, J. (2019). *Good Governance dan Pelayanan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [7] Nabatchi, T., Sancino, A., & Sicilia, M. (2017). *Public Value Management, Governance and Reform*. *Public Administration Review*, 77(5), 679-689.
- [8] Dwiyanto, A. (2015). *Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tantangan dan Harapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [9] Heeks, R. (2018). *Information Systems and Public Sector Reform*. London: Routledge.
- [10] Siagian, S. P. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.